

## BANK NAGARI MULAI DIPERTANYAKAN

Dalam usianya yang ke 44, Bank Nagari mulai memperlihatkan profesionalnya, sebelumnya Bank Nagari berbentuk badan usaha milik daerah (BUMD), menginjak menjadi perseroan terbatas (PT).

Perkembangan Bank Nagari tidak terlepas dari peran nasabah yang nota bene didominasi oleh usaha ekonomi kerakyatan, sehingga disaat krisis moneter menimpa Indonesia, Bank Nagari tetap tegar.

Dalam laporan keuangan 2005, total aktiva Bank Nagari berjumlah sebesar Rp. 3.443.449.000.000,- laba bersih tanggal 30 September 2005 diperoleh sebesar Rp. 150.062.000.000,- dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 124.492.000.000,- naik sebesar 20,53 %.

Adapun pemilik saham Bank Nagari terdiri dari:

- Pemda propinsi Sumatera Barat 40,65%
- Pemda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 57,76%
- Koperasi Karyawan BPD Sumatera Barat 1,59%

Dari ketiga pemegang saham tersebut, saham terbesar dimiliki oleh Pemda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Saat ini kabupaten/kota se-Sumatera Barat berjumlah 19 buah. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, masyarakat telah mulai mempertanyakan berapa jumlah saham untuk kabupaten/kota masing-masing. Demikian juga dengan kabupaten Pasaman Barat yang baru saja dimekarkan.

Ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam pemikiran masyarakat yaitu:

1. Berapa saham Pemda Kabupaten Pasaman Barat di Bank Nagari.
2. Berapa pendapatan yang diperoleh Pemda Pasaman Barat atas penyertaan saham tersebut
3. Dikemanakan uang yang diperoleh dari pembagian deviden selama ini.

Di Pasaman Barat terdapat 2 cabang Bank Nagari, yang aktivanya diperkirakan lebih dari Rp. 500 milyar, dimana penyertaan modal oleh Pemda Pasaman Barat, dananya berasal dari masyarakat Pasaman Barat, maka wajarlah masyarakat mengetahui tentang pengelolaan uang tersebut dan hendaknya transparan, dan bukan menjadi pendapatan bagi pejabat dan beberapa golongan orang saja.



Bank Nagari Cabang Simpang Empat, potensi kredit macet Rp. 45 milyar

LSM Wampel, sebagai kontro sosial masyarakat telah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat guna menyalurkan aspirasi mereka. Untuk hal tersebut LSM Wampel akan mempersiapkan Tim Investigasi yang akan melakukan pengumpulan data di lapangan. Selain dari kepemilikan saham tersebut, LSM Wampel juga banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan petani plasma kebun kelapa sawit yang didanai dari KI-KKPA yang disalurkan melalui Bank Nagari Simpang Empat, dimana beberapa kebun plasma tersebut mengalami kredit macet.

Seperti halnya kebun plasma KUD Aur Kuning, hingga saat ini tidak jelas statusnya, masyarakatlah yang jadi korban, jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan konflik horizontal. Demikian juga dengan kebun plasma KUD Saiyo Air Gadang dan unit Bali Groupnya, penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Sampai saat ini petani peserta plasma belum menikmati hasilnya seperti yang diharapkan.

Hal serupa juga terjadi di KUD Lingkung Aur II, kebun plasma tahap II Rimba Candung, sejak kebun dibangun tahun 1997, sampai saat ini petani belum dapat menerima hasil yang jelas dan pasti. Banyak petani peserta yang mengeluhkan kecilnya pendapatan, yang hanya berkisar rata-rata Rp. 100.000,- per bulan.

Problematika tersebut terjadi tidak terlepas dari *SDM* nya sendiri. Untuk diketahui, pembangunan kebun plasma kelapa sawit KKPA dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Penyaluran dana tersebut tidak sepenuhnya mengacu kepada study kelayakan proyek. Bank-bank penyalur berupaya mendapatkan dana tersebut untuk meningkatkan CAR, tanpa memperhatikan kelayakan proyek. Selain hal tersebut hancurnya kebun KUD Aur Kuning tidak terlepas dari pengelola sendiri yang pada saat itu KUD sebagai pelaksana, PT. PN6 sebagai bapak angkat dan BPD Simpang Empat sebagai penyandang dana. Ketiga unsur inilah yang harus bertanggung jawab terhadap kredit macet yang terjadi di kebun KUD Aur Kuning.



Kebun Kelapa Sawit, Banyak dijadikan sekedar proyek

Kehancuran kebun plasma tersebut juga akibat terjadinya *kong kalikong* dalam pengelolaannya, tidak dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum, setiap adanya pembangunan kebun plasma maka berubahlah ekonomi pengurus koperasi, datuk/ninik mamak dan juga oknum bank itu sendiri. Menurut Penyaluran dana KLBI untuk KI-KKPA yang pertama sekali diuntungkan adalah bank penyalur, berikutnya apakah proyek berhasil dan masyarakat menikmati?, itu nomor sekian.

Pada saat pembangunan kebun Batang Lingkin dan KUD Aur Kuning, pimpinan Bank Nagari cabang Simpang Empat saat itu adalah Nazwar Nazir, SE dan pernah menjabat sebagai direksi Bank Nagari, lemahnya kontrol yang terjadi saat itu harus menjadi tanggung jawab pimpinan cabang termasuk macetnya kredit tersebut. Hendaknya pencapaian puncak karir yang diperoleh Nazwar Nazir, harus dibarengi dengan penyelesaian kredit macet di Bank Nagari Simpang Empat berikut segudang permasalahan proyek KKPA yang ditinggalkannya dan bukan mengatrol bawahan untuk keamanan jabatan. LSM Wampel siap membongkar semua kebobrokan yang terjadi di lembaga keuangan tersebut, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Pasaman Barat (*Tim Wampel*).